

## ABSTRAK

### REFORMULASI PERATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM TERKAIT PERBUATAN PIDANA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ismi Khairunisa (2210622039), Handoyo Prasetyo, Beniharmoni Harefa

Konflik kewenangan antara sita pidana dalam hukum acara pidana dan sita umum dalam hukum kepailitan merupakan persoalan yuridis yang terus muncul dalam praktik peradilan di Indonesia. Sita pidana berfungsi untuk mengamankan barang bukti demi kepentingan pembuktian tindak pidana, sedangkan sita umum kepailitan bertujuan menjamin pelaksanaan pemberesan harta pailit yang berada di bawah penguasaan kurator. Persinggungan tersebut menjadi persoalan ketika objek yang telah masuk ke dalam boedel pailit kemudian disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses pidana. Ketidakjelasan norma mengenai mekanisme prioritas dan penyelesaian konflik antara dua rezim hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana tampak pada putusan-putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan inkonsistensi dalam memutus perkara serupa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan analisis putusan untuk mengkaji pengaturan kewenangan sita pidana dan sita umum kepailitan serta merumuskan pembaharuan pengaturannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa diperlukan reformulasi hukum untuk mengharmonisasikan pengaturan mengenai sita pidana dan sita umum melalui penegasan hierarki kewenangan, mekanisme koordinasi antara kurator dan penyidik, serta pedoman yudisial guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak, terutama kreditur dalam proses pemberesan harta pailit. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma khusus yang mengatur prioritas sita dan tata cara penyelesaian konflik antar-regulasi guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemulihan kerugian negara.

**Kata Kunci:** sita pidana; sita umum kepailitan; kurator; penyidik; kepastian hukum.

## **ABSTRACT**

### **REFORMULATION OF CRIMINAL CONFISCATION REGULATIONS ON GENERAL CONFISCATION RELATED TO CRIMINAL ACTIONS PROVEN TO CAUSE STATE FINANCIAL LOSS**

Ismi Khairunisa (2210622039), Handoyo Prasetyo, Beniharmoni Harefa

*This study aims to analyze the implementation of prosecution termination based on restorative justice in Domestic Violence (DV) cases, as regulated in the Indonesian Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. The research is grounded on the legal opportunity that allows prosecutors to discontinue DV cases when specific conditions are met, including a voluntary reconciliation agreement, the offender's acknowledgment of wrongdoing, and restitution or recovery for the victim. The urgency of this research lies in balancing formal law enforcement with a more humanistic and victim-centered approach. The study employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches, supported by literature review. The findings reveal that implementing restorative justice in DV cases faces significant challenges, such as power imbalances, the risk of re-traumatization, and limited regulatory and institutional capacity. Nevertheless, when applied with caution, strict procedures, and adequate legal and psychological support, restorative justice can serve as an effective instrument for achieving true victim recovery, restoring human dignity, and fostering substantive accountability from the offender. This research concludes that restorative justice should not merely be seen as an alternative to prosecution but as a meaningful path toward a more humane and substantial form of justice.*

**Keywords:** Domestic Violence; Offender Accountability; Prosecution; Restorative Justice; Victim Recovery.